

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori *Stakeholder***

Menurut Imam Ghhozali, 2013 Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* yaitu pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain. Defines *stakeholder* telah berubah selama empat dekade terakhir, yang pada mulanya pemegang saham dipandang sebagai satu-satunya *stakeholder* perusahaan. Seiring berjalannya waktu, pandangan akan *stakeholder* berubah dengan memperluas definisi, tidak hanya kelompok pemegang saham saja yang dipandang sebagai *stakeholder* dari perusahaan, bahkan kelompok yang tidak menguntungkan (*adversial grup*) seperti pihak regulator dan pihak yang memiliki kepentingan tertentu juga dimasukkan dalam cakupan *stakeholder*. Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan tersebut. Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi *stakeholder*.

##### **2.1.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (Wikipedia, 2010). Penelitian yang dilakukan Susanti (2010) dalam Sumarjo (2010) mendefinisikan laporan keuangan sebagai salah satu informasi yang secara formal wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik, serta jendela informasi yang memungkinkan bagi pihak-pihak diluar manajemen, mengetahui kondisi entitas tersebut.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan Ketaatannya terhadap peraturan Perundang-undangan (akuntansiterapan.com dalam Soraca Devi, 2015)

Laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan laba/rugi, perubahan ekuitas, dan aliran kas mempunyai fungsi berikut.

a. Neraca

1. Menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu.
2. Memberikan informasi tentang alokasi penggunaan dana perusahaan yang merupakan kebijakan investasi perusahaan.
3. Memberikan informasi tentang sumber dana untuk membiaya investasi tersebut.

b. Laporan Laba/Rugi

1. Menilai keberhasilan operasi dan efisiensi manajemen di dalam mengolah kegiatan operasional perusahaan.
2. Menilai profitabilitas (kemampuan menghasilkan laba) dari modal yang diinvestasikan ke dalam perusahaan.
3. Membuat perencanaan laba yang akan diperoleh di masa datang.

c. Perubahan Ekuitas

1. Dapat digunakan untuk mengetahui perubahan aktiva.
2. Dapat digunakan untuk mengetahui perubahan kewajiban.
3. Mengetahui kinerja perusahaan.

d. Aliran Kas

1. Membantu investor dan kreditur dalam memperkirakan jumlah kas yang akan diterima dalam bentuk dividen, bunga, atau pengembalian pokok dana yang ditanam di perusahaan.
2. Membantu manajemen dalam memperkirakan risiko yang mungkin akan terjadi.

Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

### **2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan**

Kebutuhan akan standar akuntansi pemerintahan menguat ketika di sektor komersil mengeluarkan standar akuntansi keuangan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 1994. Pada tahun 2002 menteri keuangan membentuk standar Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun Konsep SAP Pusat dan Daerah (Lesmana, 2010). Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP No. 24, 2005).

Perkembangan SAP sejak tahun 2001, Indonesia mulai menjalankan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, untuk penyelenggaraan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pemda diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (setyaningrum dan syafitri, 2012)

### **2.1.3 Pengungkapan**

Pengungkapan informasi yang memadai, baik data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, harus ditekankan pada informasi yang material dan relevan yang dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan harus

dapat menambah nilai informasi dan bukan mengurangnya dengan adanya keterangan yang terlalu terinci dan sulit dianalisis (Lesmana, 2010)

Menurut Chariri dan Ghazali (2003: 247), pengungkapan dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:

1. Pengungkapan Wajib (*mandatory disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan tentang informasi yang diharuskan oleh peraturan yang telah ditetapkan oleh badan otoriter. Untuk sektor publik di Indonesia, pengungkapan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

2. Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela merupakan informasi yang tidak diwajibkan oleh suatu peraturan yang berlaku, tetapi diungkapkan oleh entitas karena dianggap relevan dengan kebutuhan pemakai.

#### **2.1.3.1. Pengungkapan Informasi Dalam Laporan Keuangan**

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai Posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Penyediaan informasi tersebut untuk kepentingan transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Lesmana, 2010).

#### **2.1.4. Karakteristik Pemerintah daerah**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2006), karakteristik adalah ciri-ciri khusus yang mempunyai sifat khas ( kekhususan ) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain.

Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah untuk menandai sebuah daerah dan membedakannya dengan daerah lain ( Suhardjanto dan yulianingtias, 2010).

(Suhardjanto, 2010) karakteristik pemerintah daerah dapat berupa ukuran daerah, kesejahteraan, functional differentiation, umur daerah, latar belakang pendidikan kepala daerah, leverage daerah, dan intergovernmental revenue. Dari penjelasan diatas penelitian yang dilakukan mengenai karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran pemerintah daerah, umur pemerintah daerah, pendapatan daerah, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Choiriyah (2010) menyatakan bahwa karakteristik perusahaan dapat menjelaskan variasi luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan.

#### **2.2 Variabel Y**

Variabel ini juga dikenal dengan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi akibat variabel yang mengikat.

##### **a. Kepatuhan Pengungkapan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/kota Di Lampung.**

(Lesmana, 2010) Pengungkapan pada penelitian ini dilakukan untuk menyampaikan informasi yang relevan untuk mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang akan dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode untuk kepentingan bersifat transparan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang sudah dipercayakan kepadanya.

## **2.3 Variabel X**

Variabel ini dikenal dengan variabel dependen yang merupakan variabel yang sering disebut variabel yang terkait yang disebabkan oleh adanya variabel bebas yang membahas ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, umur pemerintah daerah, belanja daerah, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

### **2.3.1 Ukuran Pemerintah Daerah**

Sudarmaji dan sularto (2007) dalam Nugroho (2014) menyatakan, besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat. Dari ketiga variabel ini, nilai aktiva lebih stabil dibandingkan dengan nilai *Market capitalized* dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan.

Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki ukuran besar untuk memiliki ukuran besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan kinerja keuangan. Pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan atas laporan keuangan. Pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan atas laporan kinerja akan lebih terdorong untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat *good news*. *Good news* tersebut dapat berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut sehingga meningkatkan skor kinerja.

### **2.3.2 Tingkat Kekayaan Daerah**

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan

usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan.

### **2.3.3 Status Daerah**

Menurut peraturan menteri dalam negeri No. 5 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 3 “Perangkat Daerah Kabupaten/kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota. Pandangan bahwa jenis daerah mempengaruhi kelengkapan pengungkapan dikarenakan adanya perbedaan karakteristik masyarakat dan struktur pendapatan berimplikasi pada control sosial yang berbeda pula (Abdullah, 2004 dalam Nugroho, 2014).

Status daerah berpengaruh pada pendapatan suatu daerah sehingga dalam hal ini masyarakat juga bisa diikuti sertakan dalam pengawasan penyusunan anggaran/laporan keuangan daerah.

#### **2.3.4 Belanja Daerah**

(Abdulah, 2006 dalam Nugroho, 2014). Belanja daerah dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

#### **2.3.5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Satuan kerja perangkat daerah merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penggunaan anggaran/barang (peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan pemerintah Daerah). (Suhardjanto at al, 2010) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempresentasikan diiferensiasi fungsional atau sub. Unit berbeda, yang disebut dengan SKPD.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu.

No	Nama peneliti dan tahun	Judul penelitian	Variabel	Hasil penelitian
1.	SIGIT INDRA LESMANA, 2010	PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB DI INDONESIA	Karakteristik : Ukuran Pemerintah Daerah, Kewajiban, Pendapatan Transfer, Umur Pemerintah Daerah, Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD Kewajiban berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD Pendapatan transfer berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD Umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD Jumlah satuan kerja perangkat daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

2.	Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011	PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Ukuran (Size), SKPD, Daerah	Daerah Jumlah Status Ukuran Daerah (Size) berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan wajib. Jumlah satuan kerja perangkat daerah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan wajib. Status Daerah berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib
3.	Setyaningrum dan Syafitri, 2012	ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN		Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Jumlah anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Umur administrasi pemda berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Kekayaan Pemda berpengaruh positif terhadap

				tingkat pengungkapan wajib LKPD. JUmlah SKPD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Latar belakang pendidikan Kepala Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.
4.	Renas Adi Nugroho (2014)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuin Audit BPK Terhadap kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Diprovinsi jawa Tengah Pada Periode 2009-2011)	Ukuran Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Status Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Temuin Audit BPK.	Ukuran Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Tingkat Kekayaan Daerah Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.. Status Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dana Perimbangan Memiliki pengaruh positif terhadap

				<p>Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.          Belanja Daerah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.          Temuan Audit BPK berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p>
5.	Ayu Soraca Devi (IBI Darmajaya, 2015)	<p>PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI LAMPUNG</p>	<p>Ukuran Daerah, Kemakmuran (wealth), Ukuiran Legislatif, <i>Leverange</i>, <i>Intergovernmental Revenue</i> terhadap Kinerja keuangan pemerintah provinsi</p>	<p>Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah PAD (pendapatan asli Daerah) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Jumlah anggota DPRD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Intergovernmental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p>

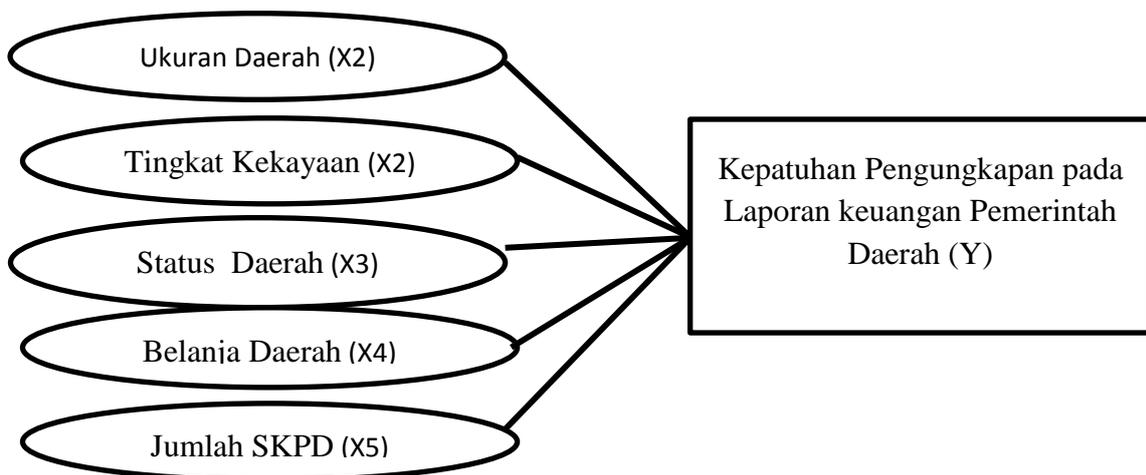
6.	Catur Dewi Yunita (IBI Darmajaya, 2016)	PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014)	Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>leverage</i> , Dewan Komisaris, Pertumbuhan Perusahaan, Likuiditas terhadap pengungkapan Laporan Tanggung Jawab Sosial	Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. <i>Leverage</i> , berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial. Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.
----	---	---	--	---

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap pengungkapan wajib akuntansi pemerintah daerah kabupaten/kota se-Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan kepada pemerintah daerah Lampung dalam membuat kebijakan akuntansi sektor publik serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya tata kelola yang baik.

**Gambar 2.1**

### **Kerangka Pikiran**



## 2.6 Bangunan Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu menguji apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Lampung. Karakteristik Pemerintah daerah terdiri dari ukuran pemerintah daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, umur pemerintah daerah, pendapatan daerah, dan jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Berikut ini merupakan pengembangan hipotesis yang dilakukan:

### 2.6.1 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran (size) merupakan salah satu elemen dari struktur organisasi (Patrick, 2007 dalam Nugroho, 2014). Terdapat bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi didalam suatu daerah dapat mempengaruhi struktur daerah. Organisasi-organisasi besar lebih cenderung memiliki banyak aturan dan ketentuan daripada organisasi kecil (*wikipedia.com*, 2010 dalam Nugroho, 2014). (Sumarjo, 2010) tuntutan publik mengenai penguungkapan wajib akan berdampak pula pada tuntutan kinerja yang dimiliki perusahaan tersebut. Pemerintah daerah akan cenderung memberikan good news dalam mengungkap laporan keuangannya. Good news tersebut dapat berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut. Penelitian (Yulianingtyas, 2011) membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengungkapan. Berdasarkan Uraian Diatas maka Hipotesis dapat dikembangkan sebagai berikut:

**H1: Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/kota.**

### 2.6.2 Tingkat Kekayaan Daerah

(Nugroho, 2014) Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Penelitian mengenai PAD, salah satunya dilakukan oleh Hadi, Hendri, dan Inapty (2009) yang mengungkapkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap jumlah belanja modal pemerintah daerah. Belanja modal ini digunakan untuk perbaikan infrastruktur daerah. Penelitian sebelumnya (Nugroho, 2014) membuktikan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian dirumuskan dalam format hipotesis alternatif sebagai berikut:

**H2: Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/kota di Lampung.**

### **2.6.3 Status Daerah**

Pada peraturan menteri dalam negeri No. 5 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 3 “Perangkat Daerah Kabupaten/kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota. Pandangan bahwa jenis daerah mempengaruhi kelengkapan pengungkapan dikarenakan adanya perbedaan karakteristik masyarakat dan struktur pendapatan berimplikasi pada control sosial yang berbeda pula (Abdullah, 2004 dalam Yulianingtyas, 2011)

Masyarakat kota memiliki kontrol sosial yang lebih kuat (Abdullah, 2004 dalam Nugroho, 2014). Dengan adanya control sosial tersebut, tuntutan gentar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah agar terselenggara pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat serta danya pengaruh globalisasi menuntut adanya keterbatasan (Herminingsih, 2009 dalam Nugroho, 2014). Pada penelitian sebelumnya yang diulakukan oleh (Yulianingtyas, 2011) Status daerah berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H3 : Status daerah berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/kota di Lampung.**

#### **2.6.4 Belanja Daerah**

Menurut Kepmendagri No.29 Tahun 2002 Pasal 1 huruf q, Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Menurut UU No.32 Tahun 2004, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengeluaran pembangunan untuk belanja daerah sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan infrastruktur, kualitas sdm, dll. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Purba (2006) dalam Nugroho, (2014) yang membuktikan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro di Kabupaten Simalungun dan Rustiono (2008) dalam Nugroho, (2014) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu berdasarkan penelitian (Nugroh, 2014) Belanja daerah berpengaruh terhadap Kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian dirumuskan dalam format hipotesis alternatif sebagai berikut:

**H4: belanja daerah berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Lampung.**

#### **2.6.5 Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Pemerintah daerah merupakan salah satu entitas pelaporan, yaitu unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Semakin banyaknya diferensiasi fungsional dalam pemerintah daerah akan lebih banyak ide, informasi, dan inovasi yang tersedia berkaitan dengan pengungkapan (Mandasari, 2009 dalam lesmana, 2010). SKPD merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan

pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dilingkungan pemda. Semakin banyak jumlah SKPD yang dimiliki berarti semakin kompleks pemerintahan tersebut, sehingga semakin besar tingkat pengungkapan yang harus dilakukan (Hilmi, 2011 dalam Styaningrum dan syafitri). Penelitian terdahulu (yulianingtyas, 2011) membuktikan bahwa Jumlah satuan kerja perangkat daerah berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas hipotesis dapat dikembangkan sebagai berikut:

**H5 : Pengaruh jumlah satuan kerja pemerintah daerah terhadapkepatuhan pengungkapan pada laporan kuangan pemerintah daerah Kabupaten/kota.**